

HEGEMONI ELIT MEMBANGUN GERAKAN SOSIAL
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA SEKITAR PERTAMBANGAN
GALIAN C DI DESA MANYARAN KECAMATAN BANYAKAN
KABUPATEN KEDIRI)

ANIS SURYANI
NIM. 115120101111021

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kerusakan lingkungan fisik seperti polusi, sarana prasarana desa dan juga lingkungan sosial di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sebagai desa pertambangan galian C. Melihat hadirnya dampak dari aktivitas penambangan tersebut mendorong tokoh masyarakat untuk mengajak masyarakat lainnya melakukan gerakan sosial dalam menuntut, menolak dan menutup penambangan galian C. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis inisiatif dari elit lokal dalam membangun gerakan sosial masyarakat sipil menutup tambang galian C.

Penelitian ini menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci, yaitu tentang hubungan atau bentuk kekuasaan dari kelas superordinat terhadap subordinat atas nilai kehidupan seperti kultur, nilai dan norma yang pada akhirnya membentuk masyarakat sebagai kelompok terdominasi mengikuti kerangka sistem dan pemikiran dari kelas superordinat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial penutupan tambang berangkat dari dampak kerusakan lingkungan fisik dan sosial serta hegemoni penguasa dari PT. Kejora dan pemerintah desa terhadap masyarakat Manyaran. Hegemoni penguasa kemudian berkembang menjadi hegemoni progresif. Dalam hegemoni progresif, elit lokal sebagai pemimpin gerakan sosial melalui tiga tahapan yaitu korporat-ekonomis, penyadaran solidaritas ekonomis dan penyadaran solidaritas atas konservasi lingkungan jangka panjang. Untuk mencapai keberhasilan gerakan sosial, dalam hegemoni progresif elit lokal menerapkan beberapa strategi yaitu *pertama* memobilisasi sumber daya manusia (*human asset*) dengan melalui penguatan jaringan sosial dan komitmen warga melalui sosialisasi dalam musyawarah bersama. Sedangkan strategi memobilisasi sumber daya *tangible* yang meliputi fasilitas dan finansial adalah dengan mendirikan portal untuk menggalang dana dan membagi hasil retribusi portal sebagai perbaikan sarana umum seperti jalan dan jembatan, serta untuk kegiatan sosial warga Manyaran.

Kata Kunci: Tambang Galian C, Gerakan Sosial, Elit Lokal, Masyarakat Sipil, Mobilisasi Sumber Daya

ABSTRACT

This research is motivated by problem of physical environment damage like pollution, village infrastructure and social environment in the Manyaran Village Banyakan Subdistrict Kediri Regency as mining excavation site C. The existence of mining activity effects encourages some public figures to invite others to get a social movement to claim, to refuse and to close the mining excavation C. Therefore, the present study aims to determine and to analyze the initiative of local elite in building a social movement of civil people to close the mining excavation C.

The present study uses hegemony theory by Antonio Gramsci about relationship or power form of superordinate class towards subordinate about life value such as culture, the value and norm will finally shape the society as the dominated group who has to follow the framework of system and thought of superordinate class. This study applies qualitative research with instrumental case approach.

The result shows that social movement of mining closing starts from the physical environmental damage effect and the ruler's hegemony from PT. Kejora and rural government towards Manyaran people. The ruler's hegemony grows become progressive hegemony. In progressive hegemony, local elite as the leader of social movement must go through three steps named corporate-economy, economy solidarity resuscitation and solidarity resuscitation over long-term environmental conservation. For the sake of the success of social movement, in progressive hegemony, the local elite apply some strategy, they are mobilize human resources (human asset) by strengthen social network and society's commitment through socialization in public discussion. Meanwhile the strategy to mobilize the tangible resources including facility and financial is by build-up a portal to raise fund and to share the portal retribution outcome to fix the public infrastructure such as highway and bridge, also to make the social activity of Manyaran people.

Keywords: Mining Excavation Site C, Social Movement, Local Elite, Civil People, Resource Mobilization.

A.REALITAS DIBALIK PERKEMBANGAN USAHA TAMBANG GALIAN C

Setiap kegiatan dan usaha manusia dalam pembangunan harus menyeimbangkan kelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup. Artinya pembangunan yang dilakukan tidak hanya menomorsatukan aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diiringi dengan pengelolaan lingkungan. Hal ini merujuk pada pembangunan berkelanjutan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Pasal 18 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap pendirian usaha yang memiliki resiko terhadap lingkungan hidup wajib mendapatkan izin usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepemilikan izin dalam bidang usaha merupakan upaya untuk membatasi hak-hak dan kewajiban bagi para pemilik usaha. Serta sebagai cara untuk

melindungi dan mengendalikan dampak lingkungan hidup dari pemanfaatan sumber daya yang diambil dari alam. Oleh karena itu setiap pendirian dan pengelolaan usaha harus memiliki izin dan bertanggung jawab atas pengelolaan dampak lingkungan.

Salah satu jenis usaha yang esensial untuk diperlukannya suatu tanggung jawab sosial adalah usaha pertambangan. Pasalnya, pertambangan merupakan suatu usaha yang secara langsung menggali sumber daya alam. Pertambangan juga erat kaitannya dengan efek atau dampak dari adanya penggalian tambang, seperti pencemaran, banjir, polusi, dan yang lainnya. Adanya dampak atau efek yang ditimbulkan oleh usaha penambangan tersebut, menyebabkan usaha pertambangan diharuskan memiliki suatu tanggung jawab sosial terutama tanggung jawab terhadap lingkungan. Selain tanggung jawab sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik usaha penambangan, dalam industri pertambangan juga harus mendapatkan izin, baik izin dari pemerintah kabupaten atau kota maupun izin dari masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Izin usaha penambangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Area pertambangan yang berada di Jawa Timur dengan luas wilayah kurang lebih mencapai 11 ribu Ha terdiri dari berbagai komoditi barang-barang tambang. Total produksi barang tambang yang dihasilkan dalam setiap tahunnya oleh Provinsi Jawa Timur mencapai 29.458.718,76 ton, dengan jenis produksi sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Produksi Barang Tambang Provinsi Jawa Timur

No	Jenis Tambang	Jumlah Hasil (ton) per tahun	Jumlah Hasil (%) per tahun
1	Batu gunung/anderit	55.255,00	0,19%
2	Pasir	2.003.432,92	6,82%
3	Batu kapur	16.311.268,00	55,52%
4	Felspart	198.094,18	0,67%
5	Tanah liat	1.868.683,00	6,36%
6	Dolomit	456.681,52	1,55%
7	Marmer	1.177.864,00	4,01%
8	Pasir kwarsa	62.973,40	0,21%
9	Bantonit	16.600,00	0,06%
10	Tanah urug	74.141,00	0,25%
11	Trass	80.225,10	0,27%
12	Pasir/krikil batu (sirtu)	7.075.176,87	24,08%
Total Hasil Tambang (ton)		29.380.394,99	100,00%

Sumber: Profil Jatim (Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur)

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam tambang tidak selalu membawa kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Melimpahnya sumber daya

alam khususnya tambang, tidak menjamin kesejahteraan masyarakat sekitar pertambangan. Ada beberapa kasus dan permasalahan dalam masyarakat yang berada di lokasi dan di sekitar area pertambangan. Baik permasalahan mengenai kesenjangan implementasi aturan dan kebijakan, maupun permasalahan tentang perlawanan masyarakat untuk menolak penambangan.

Pada pertengahan tahun 2013, salah satu wilayah penambangan galian C di Kabupaten Kediri Jawa Timur mengalami konflik dalam masyarakat sekitar area pertambangan. Konflik tersebut terjadi di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan. Konflik yang terjadi adalah penuntutan ganti rugi dan penutupan tambang galian C yang dikelola oleh PT. Kejora yang telah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Masalah yang timbul dari proses pertambangan seperti, *pertama*, kerusakan akses jalan Desa Manyaran. *Kedua*, rusaknya jembatan-jembatan dan gorong-gorong Desa Manyaran yang sering dilewati oleh truk muatan hasil galian C. *Ketiga*, menyebarnya polusi udara yang berasal dari debu akibat proses penambangan.

Fakta-fakta tersebut menyebabkan masyarakat Desa Manyaran melakukan aksi tuntutan untuk perbaikan lingkungan dan akses publik desa pada tahun 2013. Aksi tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Manyaran merupakan bentuk dari gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan suatu bentuk kolektivitas yang melakukan aksi secara ajeg untuk mendorong atau mencegah terjadinya perubahan didalam masyarakat atau kelompok (Glasser, J) (dalam Darmawan Tribowo 2006, hlm.157). Begitu pula gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Desa Manyaran untuk mendapatkan perubahan lingkungan dan perbaikan akses publik dari PT. Kejora.

Munculnya gerakan sosial masyarakat Manyaran pada Mei 2013 tersebut, seiring dengan muncul dan adanya beberapa elit lokal yang ada di Desa Manyaran. Pada dasarnya elite lokal dalam gerakan sosial sebagai seorang atau sekelompok orang yang dinilai penting untuk mengorganisasikan massa untuk melakukan suatu perlawanan. Sebagai sekelompok minoritas, elite lokal dianggap efektif dan bertanggung jawab. Efektif, terkait dengan kepentingan dan perhatian elite lokal kepada orang lain dan masyarakat secara umum dimana elite lokal itu berada. Bertanggung jawab terkait dengan tujuan-tujuan sosial yang penting dalam menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat (Yusron, 2009, hlm. 38).

Munculnya elit lokal dalam desa, memberikan dorongan kepada masyarakat sipil untuk melakukan aksi gerakan menuntut pengelola tambang galian C. Hal ini mendukung dalam proses perlawanan dan penuntutan yang memerlukan adanya pengorganisasian. Upaya pengorganisasian massa untuk melakukan gerakan dibutuhkan elite-elite lokal untuk memimpin dan mengorganisasikan massa dalam mencapai tujuan sosialnya. Sehingga, upaya-upaya yang dilakukan elite lokal dalam menggerakkan dan membangun kehendak masyarakat sipil melakukan penuntutan dan penutupan tambang galian C di Desa Manyaran menjadi menarik untuk diteliti.

Melalui tulisan ini, penulis menuangkan dalam kajian penelitian yang berjudul **“Hegemoni Elit Membangun Gerakan Sosial** (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Sekitar Pertambangan Galian C di Desa Manyaran Kecamatan

Banyakan Kabupaten Kediri). Berdasarkan latar belakang kajian penelitian tersebut penulis merumuskan masalah yakni bagaimana gerakan sosial masyarakat sipil yang terbangun dari inisiatif elite lokal desa dalam menutup tambang galian C di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?

Dalam tulisan ini digunakan dua konsep dan teori untuk menganalisis. Konsep pertama yaitu elit lokal sebagai kelompok kecil dari suatu masyarakat yang dihormati, disegani, kaya dan memiliki kekuasaan. Mereka adalah kelompok minoritas superior pada tingkat atas dari susunan masyarakat, yang memiliki kemampuan untuk mengontrol kegiatan ekonomi dan dalam beberapa hal mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan (Yusron, 2009: 68). Menurut Pareto dan Mosca, elite menunjuk kepada suatu orang, aktor atau kelompok yang memerintah, menjalankan fungsi-fungsi sosial yang penting.

Kedua, konsep mobilisasi sumber daya yang menerangkan proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan. Mobilisasi sumber daya memiliki dua pendekatan sebagai pusat analisisnya, yakni:

1. *The Political Interactive Model*. Model ini lebih menekankan pentingnya perubahan struktur kesempatan bagi aksi kolektif, keberadaan jejaring serta kaitan horizontal yang telah terbangun dengan kelompok-kelompok tertindas sebagai faktor penentu keberhasilan gerakan sosial. Model ini menempatkan relasi gerakan sosial dengan negara dan bingkai sistem politik yang ada sebagai determinan yang penting bagi keberhasilan gerakan sosial.

2. *The Organizational Entrepreneurial Model*. Model yang memandang dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya sebagai faktor yang lebih signifikan dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial. Dalam model ini gerakan sosial harus mampu mengelola sumber-sumber yang tersedia dengan baik. Sumber-sumber yang dimaksud meliputi sumber-sumber material dan sumber-sumber non-material. Sumber material seperti pekerjaan, penghasilan, dan tabungan. Sedangkan sumber-sumber non-material seperti wewenang, komitmen moral, kepercayaan, persahabatan, kemampuan dan sebagainya.

Sedangkan teori yang digunakan adalah teori hegemoni dari Antonio Gramsci yang memberi penjelasan mengenai hubungan sosial antar kelas sebagai upaya untuk mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik (Simon, 2001, hlm. 21-22). Artinya, hegemoni merupakan suatu bentuk kekuasaan atau dominasi dari kelas penguasa atas nilai kehidupan yang berupa kultur, nilai dan norma pada suatu kelompok masyarakat, yang pada akhirnya membentuk masyarakat tersebut sebagai kelompok terdominasi yang secara sadar mengikuti kerangka sistem yang dibuat oleh penguasa. Tidak hanya itu, dalam konsep hegemoni, kelompok masyarakat terdominasi tidak merasa ditindas oleh kelompok lain, justru mereka menganggap bahwa hal tersebut memang seharusnya terjadi.

Hegemoni yang pada awalnya dimiliki oleh pihak superordinat untuk kepentingan korporatis-ekonomis bergeser mengarah ke penyadaran kelompok-kelompok terpinggirkan untuk memiliki pemikiran dan sikap kritis terhadap sistem sosial yang berlaku. Artinya, dalam hegemoni progresif, kelompok hegemonik dapat mengenyampingkan kepentingan pribadi dalam hal ekonomis

dan pencapaian kekuasaan. Tetapi lebih mengarahkan kelompok-kelompok subordinat yang memiliki kekurangan dalam hal pengalaman, bahasa dan pandangan dunia menjadi kelompok yang memiliki kontrol sosial politik. Dalam hal ini, kesadaran dari subordinat sebagai kontrol sosial politik yang diwujudkan dalam bentuk integritas masyarakat yang bersifat langgeng dan organik untuk melakukan aksi kritis terhadap sistem sosial. Kekritisan dari kelompok masyarakat terlihat dari pengembangan momentum yang dilakukan melalui demonstrasi untuk menyampaikan imajinasi dan aspirasi dari tiap-tiap individu yang tergabung dalam massa.

Pengembangan hegemoni progresif menjadi suatu penyadaran terhadap kelompok merupakan bentuk dari gerakan-gerakan sosial. Dalam aksi gerakan sosial dibutuhkan persatuan dari kelompok untuk melakukan bentuk penolakan sebagai wujud partisipasi. Sebaliknya, apabila gerakan hanya sekedar penolakan tanpa diikuti oleh partisipasi maka hal tersebut sebatas penyampaian ide-ide dari tiap individu yang tidak terintegrasi.

Gerakan sosial terdiri atas gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan-gerakan sosial lama lebih meneriakkan anti kapitalisme, revolusi dan perjuangan kelas. Artinya gerakan sosial lama lebih banyak menyuarakan gerakan yang diarahkan pada kapitalisme dan industrialisme. Sedangkan gerakan sosial baru tidak sebatas pada gerakan anti kapitalisme dan perjuangan kelas. Tetapi bergerak dalam aksi anti rasisme, anti nuklir, pelucutan senjata, feminisme, environmentalisme, regionalisme dan etnisitas, kebebasan sipil dan lain-lain (Fakih, 2002, hlm.16). Gerakan sosial baru adalah gerakan transnasional, yang artinya gerakan tersebut berjuang dalam isu-isu kemanusiaan yang cakupannya berhubungan dengan kondisi mendasar keberadaan manusia seperti halnya isu-isu ekologi, lingkungan dan hak-hak kemanusiaan ketimbang isu-isu yang bersifat struktur seperti perekonomian atau negara (Fakih, 2002, hlm.20-21).

Metode penelitian yang digunakan berjenis kualitatif untuk melaporkan secara jelas, akurat, dan objektif perihal hasil pengamatan terhadap subjek (individu) dan masyarakat melalui deskripsi kata-kata atau naratif secara detail dan ilmiah (Salim, 2001, hlm.55). Pendekatan penelitian menggunakan studi kasus instrumental. *Instrumental case study* atau studi kasus instrumental yaitu pendekatan studi kasus untuk alasan secara eksternal dan bukan untuk mengetahui hakikat kasus tersebut. Jenis studi kasus ini menjadikan kasus sebagai alat untuk mengetahui hal lain diluar kasus atau isu (Yin, 1981) (dalam Creswell, 2014, hlm.139). Penggunaan studi kasus jenis ini karena bertujuan untuk mengetahui hal lain diluar kasus penutupan tambang galian C yaitu untuk memahami bagaimana aksi gerakan sosial dari masyarakat sipil yang dibangun oleh elit lokal dalam rangka penuntutan dan penutupan tambang galian C di Desa Manyaran.

Analisis data menggunakan logika penjodohan pola yang mencoba membandingkan pola yang didasarkan atas empiris dengan pola yang diprediksikan atau atas konsep dan teori yang digunakan. Jika kedua pola ada persamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan (Yin, 2013, hlm.140). Berdasarkan teknik penjodohan pola, penulis merumuskan proposisi yang dibuat dari temuan-temuan ketika melakukan penggalan data, adapun proposisi-proposisi tersebut adalah sebagai berikut:

Pola I : Ide gerakan sosial menutup tambang galian C muncul dari kondisi kerusakan lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang dimiliki oleh elit lokal

Pola II: Strategi yang dilakukan oleh elit lokal Desa Manyaran meliputi sosialisasi tentang dampak penambangan, pengorganisasian komitmen massa dan penggalangan serta pembagian dana retribusi untuk perbaikan lingkungan fisik dan kegiatan sosial warga.

Informasi-informasi dan data-data yang telah dipolakan terkait masalah penuntutan dan penutupan tambang galian C oleh masyarakat Desa Manyaran bersama dengan elit lokal desa yang memberikan inisiatif gerakan kemudian disandingkan dan didialogkan dengan konsep dan teori dari Antonio Gramsci tentang masyarakat sipil dan gerakan sosial.

Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive* dengan cara menentukan informan yang dianggap representatif terhadap kriteria yang ditentukan peneliti (Salim, 2001, hlm.12). Peneliti mengklasifikasi tiga tipe informan, yakni 10 informan kunci (*key informants*), yaitu informan yang memberikan keterangan pertama tentang permasalahan atau studi yang diangkat dalam penelitian. Informan kunci mengarahkan peneliti dalam memahami situasi dan kondisi gerakan sosial yang terjadi di Desa Manyaran. Pada penelitian ini informan kuncinya yaitu Kepala Dusun Manyaran sebagai perangkat desa dan menjadi salah satu pihak yang mengetahui jalan dan proses aktivitas penambangan sekaligus gerakan sosialnya. 2) informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Pada penelitian kali ini informan utamanya adalah elite lokal sebagai subjek yang dijadikan sumber informasi utama terkait dengan aksi gerakan penuntutan dan penutupan tambang. 3) informan tambahan, yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti

A. DESKRIPSI UNIT OBSERVASI DESA MANYARAN

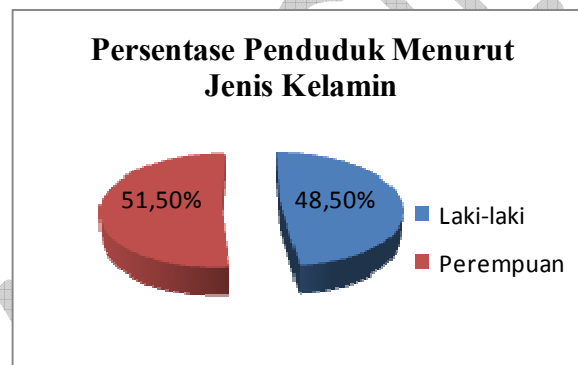
Desa Manyaran merupakan salah satu desa di Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Kota Kediri. Menurut kondisi geografisnya, Desa Manyaran berada pada ketinggian 400 meter dari permukaan laut, curah hujan rata-rata pertahun 20 mm. Berdasarkan kondisi dan topografi tersebut, Desa Manyaran termasuk desa yang berada pada dataran tinggi. Berdasarkan data monografi Desa Manyaran tahun 2012, Desa Manyaran memiliki luas wilayah desa sekitar 514.977 Ha. Dengan, luas wilayah tersebut Desa Manyaran memiliki tujuh dusun yang lokasinya terletak secara terpisah satu sama lain.

Dusun yang memiliki jarak tempuh paling jauh dari pusat pemerintahan desa adalah dusun Ngesong. Dusun Ngesong tepatnya berada di arah barat daya dari Dusun Manyaran. Jarak tempuh untuk menuju Dusun Ngesong adalah sekitar 6 KM dari pusat administrasi desa. Sebelumnya, saat tambang galian C di daerah Sumber Bentis (Ngesong) masih aktif, jalan menuju Dusun Ngesong masih bebatuan dan berdebu sehingga waktu yang digunakan untuk menempuh perjalanan ke pusat pemerintahan desa lebih lama yaitu dapat mencapai 25-30 menit. Keberadaan tambang galian C yang menyebabkan akses jalan di Desa Manyaran tidak maksimal membuat warga kerepotan untuk melakukan

mobilisasi. Mobilisasi seperti bekerja, sekolah, berdagang membutuhkan waktu yang cukup lama karena terhambat jalan yang tidak mendukung. Oleh karena itu, pada tahun 2013 warga Manyaran berinisiatif melakukan gerakan sosial untuk menuntut perbaikan jalan dan sekaligus menutup aktivitas tambang.

Berdasarkan data profil Desa Manyaran tahun 2012, penduduk Desa Manyaran berjumlah 6637 orang dengan jumlah total penduduk laki 3218 orang dan penduduk perempuan 3419 orang. Dengan jumlah persentase penduduk laki-laki dan perempuan desa Manyaran tersebut, nyatanya dalam partisipasi gerakan menutup tambang galian C paling banyak adalah dari penduduk laki-laki. Meskipun dalam jumlah secara keseluruhan penduduk perempuan lebih banyak, namun mayoritas perwakilan dalam musyawarah dipilih dari kalangan laki-laki bukan dari perempuan. Masyarakat dari kalangan perempuan tidak dilibatkan sama sekali dalam pengambilan keputusan penutupan tambang, melainkan diwakili oleh para laki-laki yang termasuk dalam tokoh lingkungan atau tokoh masyarakat di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan.

Gambar 1. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin



Sumber: Monografi Desa Manyaran (2012)

Penduduk Desa Manyaran yang secara keseluruhan berjumlah 6637 orang, dengan 2994 orang berada pada usia produktif memiliki beberapa macam mata pencaharian atau pekerjaan. Adapun daftar mata pencaharian penduduk Desa Manyaran Kecamatan Banyakan berdasarkan Data Monografi Desa Manyaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Petani	284	9,19%
2.	Buruh Tani	426	13,79%
3.	Pedagang	124	4,02%
4.	Industri	103	3,35%
5.	Pengrajin	8	0,25%
6.	Penggalian / Pertambangan	0	0%
7.	Nelayan	1	0,03%
8.	Jasa	90	2,93%
9.	Tukang Bangunan dan Kayu	211	6,84%
10.	Pegawai	85	2,75%
11.	ABRI	14	0,45%
12.	Pensiunan	8	0,25%
13.	Lain-lain	1734	56,15%
Jumlah		3.088	100%

Sumber: Data Monografi Desa Manyaran (2012)

Mata pencaharian yang bersifat heterogen di Desa Manyaran tentunya memerlukan suatu mobilisasi dari tempat satu ketempat yang lainnya. Misalnya, buruh tani untuk menggarap sawah diperlukan akses jalan untuk menempuh lahan pertaniannya bahkan petani juga membutuhkan untuk membawa hasil pertaniannya. Profesi-profesi yang lain seperti tukang, buruh pabrik, dan pedagang sangat memerlukan akses transportasi dan jalan sebagai akses utama. Kondisi jalan yang rusak menjadi faktor penghambat para buruh pabrik untuk datang secara tepat waktu dan bahkan para pedagang yang hendak ke pasar. Oleh karena itu, kondisi jalan yang rusak akibat galian C menjadi alasan untuk melakukan aksi gerakan sosial secara serentak dari para pemilik profesi tersebut.

Sedangkan menurut tingkat pendidikannya penduduk Desa Manyaran masih memiliki angka 677 orang yang tidak menginjak bangku pendidikan. Jumlah masyarakat yang telah lulus sekolah adalah tamatan SD yaitu dengan jumlah 618 orang. Kemudian disusul oleh tamatan SMP dengan jumlah 291 orang. Selanjutnya, untuk tingkatan SMA masyarakat Manyaran memiliki tamatan SMA sejumlah 208 orang. Dan, untuk lulusan Perguruan Tinggi atau Sarjana sejumlah 16 orang. Artinya, jika melihat data tersebut bahwa tingkat pendidikan masyarakat Manyaran masih tergolong rendah.

Rata-rata tingkat pendidikan penduduk Manyaran yang masih rendah, dimana menjadikan masyarakat Manyaran mudah dikondisikan. Perbandingan persentase yang cukup tinggi antara tingkat pendidikan SD dengan SMA maupun perguruan tinggi yaitu berturut-turut 27,70%, 9,23%, dan 0,72% merupakan bukti bahwa warga Manyaran belum banyak yang memiliki jenjang pendidikan tinggi. Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan penelitian, hal itu menjadi ruang bagi pemilik modal sebagai pengelola tambang untuk mengondisikan warga melalui dominasi-dominasi secara finansialnya.

B. REALITAS DAN DINAMIKA PENAMBANGAN GALIAN C DI DESA MANYARAN

Tambang galian C yang terdapat di Desa Manyaran mulai dibuka sekitar tahun 2005. Aktivitas tambang yang dilakukan mulai tahun 2005 tersebut awalnya dimiliki oleh perorangan dan dikelola secara manual. Namun, pada akhir tahun 2012 tambang galian C sudah tidak dikelola oleh perorangan melainkan berada dibawah kontrak PT. Kejora yang berasal dari Surabaya. Pada saat itu tambang galian C dikelola untuk mencukupi kebutuhan pabrik yang baru dibangun di wilayah Ngebrak Kertosono Kabupaten Nganjuk yaitu pabrik Apache. Untuk mencukupi keperluan batu maupun tanah untuk pondasi pabrik tersebut, kemudian PT. Kejora mendatangkan alat berat sejumlah tujuh (7) unit.

Hadirnya PT. Kejora dalam Desa Manyaran otomatis merubah jalinan atau hubungan antara dua golongan masyarakat. Jalinan yang semula terbentuk dari dua jenis masyarakat. Kemudian muncul PT. Kejora sebagai pemilik produksi atau pemilik modal yang turut menambah ikatan antara masyarakat sipil dan masyarakat politik dalam bidang pertambangan galian C di Desa Manyaran. Masyarakat politik yaitu pemerintah Desa Manyaran yang sebelumnya hanya bertugas sebagai bagian yang memiliki hubungan legal dengan masyarakat sipil dalam sistem administrasi berubah menjadi pihak atau lembaga yang memiliki kekuatan wewenang dalam mengatur hubungan antara pemilik produksi dan masyarakat sipil pada aktivitas penambangan galian C.

Sebagai *supplier* batu pondasi dan tanah uruk untuk keperluan pabrik Apache tersebut, otomatis pengelolaan tambang tidak hanya cukup dengan menggunakan cara manual sebagaimana yang telah dikelola pada tahun-tahun sebelumnya. Sebab, dengan memakai bantuan mesin dirasa PT. Kejora dapat menghasilkan tambang batu secara lebih cepat dan maksimal. Melalui bantuan 7 (tujuh) alat berat tersebut, hasil yang diperoleh tambang galian C mencapai 100 hingga 200 truk dalam sehari. Hasil yang diperoleh sungguh berbanding tinggi dengan menggunakan cara manual yang hanya mampu menghasilkan 5 truk kecil dalam sehari.

Peralihan sumber daya manual (manusia) menuju sumber daya mesin atau teknologi merupakan ciri dari perubahan masyarakat pertanian Desa Manyaran ke masyarakat industri. Dalam konsep gerakan sosial lama, perubahan dan lahirnya suatu industrialisme membawa sejumlah gerakan-gerakan sosial yang menentang industri dan kapitalisme. Begitu pula yang terjadi di Manyaran, hadirnya pemilik produksi yaitu PT. Kejora yang membawa beberapa teknologi kemudian juga mendorong masyarakat sipil melakukan aksi gerakan sosial penutupan tambang galian C.

Aksi penutupan tambang oleh masyarakat sipil berangkat dari peralihan sumber daya tersebut, yang pada akhirnya membawa serentetan armada truk sebagai transportasi yang membawa hasil tambang. Jumlah armada truk yang terlalu banyak membawa beberapa dampak pada kondisi sarana umum bagi Desa Manyaran. Dampak yang begitu dirasakan oleh masyarakat Manyaran adalah rusaknya jalan desa. Kondisi jalan desa yang sempit dan kemudian dilewati armada truk menyebabkan masyarakat dalam desa mengalami kesulitan saat

bertransportasi. Selain itu, banyaknya muatan-muatan hasil tambang yang dibawa menjadikan badan-badan jalan desa banyak yang ambles.

Pergantian sumber daya manusia menjadi tenaga mesin pada akhirnya membawa masyarakat Manyaran melakukan aksi gerakan sosial. Namun, berbeda dari konsep gerakan lama yang identik dengan gerakan-gerakan anti industrialisme dan gerakan perjuangan kelas. Gerakan sosial yang dilakukan adalah sebuah aksi kolektif masyarakat yang didasari oleh kerusakan dan kerugian secara materiil dan juga untuk menuntut perbaikan lingkungan dan akses sarana prasarana masyarakat yang rusak. Oleh karena itu, gerakan sosial yang terjadi bukan sebagai sebuah gerakan sosial lama, tetapi sudah masuk pada gerakan sosial baru yang mengangkat isu-isu lingkungan dan humanis mengenai hak-hak akses masyarakat khususnya sarana prasarana umum Desa Manyaran.

Jadi, titik poin gerakan sosial yang dilakukan masyarakat Manyaran bukan sebagai gerakan sosial lama adalah karena aksi gerakan tersebut tidak didasarkan pada penolakan masuknya industri yang dicirikan oleh peralihan sumber daya manual ke teknologi. Tetapi aksi gerakan sosial berangkat dari isu atau faktor kerusakan lingkungan khususnya jalan dan jembatan sebagai sarana dan hak asasi atas akses transportasi. Meskipun, peralihan sumber daya sebagai faktor penyebab kerusakan lingkungan.

Munculnya berbagai dampak aktivitas tambang pada warga Manyaran kemudian membawa PT sebagai pengelola tambang membuat janji. Janji yang dilontarkan pada masyarakat Manyaran adalah akan membenahi semua kerusakan sarana umum yaitu baik jalan desa maupun jembatan. Namun, dengan semua janji yang telah dibuat dengan warga desa seperti pembenahan jalan-jalan yang berlubang dan pemberian kompensasi pada akhirnya tidak ditepati.

Faktor lain yang menjadi penyebab masyarakat Manyaran resah terhadap keberadaan tambang galian C adalah pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dimana aktivitas penggalian tambang melebihi batas normal waktu yang telah disepakati antara pihak PT selaku penambang dengan masyarakat Manyaran. Aktivitas penggalian tambang yang seharusnya dilakukan dalam waktu 9 - 10 jam dalam sehari. Namun kenyataannya dilakukan dalam waktu lebih dari 16 jam dalam sehari. Menurut warga Manyaran hal tersebut sudah tidak sesuai dengan kontrak yang dijanjikan. Selain itu juga terjadi alih fungsi bangunan yang seharusnya digunakan untuk memudahkan pengawasan dalam aktivitas penambangan, nyatanya berganti fungsi untuk tempat mabuk atau minum minuman keras dan menjadi tempat hiburan malam.

Disisi lain, penutupan tambang tersebut juga sebagai upaya pencegahan terhadap bahaya banjir. Bukit-bukit pegunungan yang mampu menahan air hujan akan hilang apabila terus digali dan dikepras untuk mencukupi kebutuhan pabrik yang tiada habisnya. Oleh karena itu, jika aktivitas penambangan galian C di Ngesong maka air hujan akan mudah masuk ke wilayah Desa Manyaran yang letaknya lebih rendah dari area tambang di Sumber Bentis tersebut.

Jadi, bukan tanpa alasan masyarakat menutup tambang galian yang terdapat di Desa Manyaran. Banyak faktor yang menjadi penyebab gerakan sosial masyarakat Manyaran menutup aktivitas tambang galian C yaitu *pertama*, peralihan penambangan dengan cara manual ke mesin membawa masuknya

beberapa alat berat untuk membantu proses penambangan. *Kedua*, jumlah armada truk yang semakin lama semakin banyak hingga mencapai lebih dari 100 truk dalam sehari. *Ketiga*, kerusakan sarana umum seperti jalan dan jembatan yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan dan kematian masyarakat sekitar. *Keempat*, perjanjian perbaikan jalan dan pemberian kompensasi untuk masyarakat Manyaran yang tidak pernah diwujudkan. *Kelima*, aktivitas pengelolaan tambang yang waktunya melebihi batas normal jam kerja. *Keenam*, penyalahgunaan bangunan di area tambang sebagai tempat hiburan malam oleh pengawas tambang galian dan juga para sopir truk. *Ketujuh*, penggalan tambang yang secara terus menerus akan dapat menimbulkan banjir di wilayah Desa Manyaran.

D. MUNCULNYA HEGEMONI DALAM GERAKAN SOSIAL MENUTUP PERTAMBANGAN GALIAN C DESA MANYARAN

Aktivitas penambangan galian C berjalan cukup lama yaitu sejak tahun 2005 hingga 2012. Selama proses penambangan galian C di Desa Manyaran tidak ada konflik dan pertentangan apapun. Penerimaan masyarakat terhadap kegiatan tambang yang telah bertahun-tahun tersebut bukan penerimaan secara sukarela, melainkan menerima dengan keadaan terpaksa dan pasrah. Penerimaan tersebut seolah-olah karena masyarakat merasa bahwa penambangan dimiliki oleh pengusaha yang memiliki kekuatan finansial.

Pada awal pembukaan tambang tahun 2005 hingga berjalan sampai tahun 2012 masyarakat Manyaran tidak melakukan pengaduan dan penuntutan terhadap pengusaha (PT. Kejora). Hal ini karena seolah-olah masyarakat Manyaran merasa bahwa masyarakat tidak memiliki daya untuk menolak dan menuntut apa yang telah dikehendaki oleh pengusaha. Maka dari itu, masyarakat Manyaran merasa tidak mampu untuk melawan PT. Kejora selaku pemilik tambang tersebut. Dan pada akhirnya, masyarakat Manyaran memilih untuk tidak mengambil sikap apapun selain untuk menerima adanya usaha penambangan galian C di desanya. Ditambah lagi, karena dasar dari sikap masyarakat desa yang tidak mau ambil resiko dan lebih memilih untuk cari aman saja.

Menurut pernyataan Gramsci mengenai hubungan kekuasaan muncul dari berkembangnya kekuatan materi yang menjadi dasar lahirnya berbagai kelas sosial. Dalam setiap masyarakat memiliki tingkat materi yang satu sama lain berbeda. Perbedaan tersebut kemudian melahirkan berbagai bentuk kelas-kelas seperti kelas atas, menengah dan kelas bawah. Kelas yang memiliki kekuatan materi unggul pada umumnya akan menjadi kelas paling tinggi. Dan hal ini akan memunculkan hubungan kekuasaan dengan kelas-kelas lain dibawahnya yang berada dalam satu lingkaran masyarakat. Begitu pula yang terjadi dalam masyarakat Manyaran, hadirnya PT. Kejora atau pengusaha yang menjadi pengelola tambang galian C di Desa Manyaran menyebabkan munculnya kelas-kelas dalam masyarakat desa. PT. Kejora yang dipandang sebagai kelas atas memiliki kekuatan materi lebih dibandingkan dengan masyarakat biasa.

Dominasi ekonomi oleh pengelola tambang galian C yaitu PT. Kejora terhadap masyarakat Desa Manyaran menjadi bentuk salah satu hegemoni. Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai hubungan sosial yang menggiring orang atau kelompok supaya memandang masalah sosial sesuai dengan kerangka

yang mereka tentukan. Penerimaan warga Manyaran atas aktivitas tambang menjadi indikasi bahwa ia (pengelola tambang) melakukan hegemoni melalui upaya menggiring masyarakat untuk melihat aktivitas penambangan galian C sebagai hal yang wajar.

Bentuk hegemoni yang berlangsung yaitu hegemoni penguasa. Hegemoni penguasa muncul dari hadirnya PT. Kejora sebagai pemilik faktor produksi. Perbandingan materi (ekonomi) antara warga dengan PT. Kejora yang tinggi menjadi pemicu munculnya hegemoni kuasa oleh penambang. Hubungan kekuasaan yang terlihat antara pengelola tambang dengan masyarakat yaitu hubungan dimana pengelola tambang mengondisikan atau menguasai masyarakat Manyaran melalui kekuatan finansialnya.

Kepasifan masyarakat Manyaran sebagai bentuk hegemoni penguasa, selain disebabkan oleh unsur perbedaan ekonomi (materi) juga akibat unsur paksaan atau koersi. Dimana, pengondisian masyarakat Manyaran oleh PT. Kejora sebagai pengelola tambang dibantu oleh sebagian dari masyarakat Manyaran atau yang sering disebut preman kampung. Sikap dan perilaku preman yang identik kasar dan menggunakan cara kekerasan untuk mengancam warga menjadi momok bagi masyarakat Manyaran untuk menolak dan menentang aktivitas tambang galian C. Bukan pada sikap dan kekerasan dari para preman yang menjadi hegemoni, tetapi lebih pada janji pemberian materi dan intimidasi yang dilontarkan oleh preman-preman tersebut menjadi unsur penutup mulut warga Manyaran untuk menentang tambang galian C.

Bukan hanya alasan tambang dikelola oleh PT. Kejora sebagai kelas penguasa, namun ada faktor lain yang menyebabkan masyarakat sulit untuk menentang tambang galian C. Faktor tersebut adalah minimnya dukungan dari perangkat desa selaku pihak yang menjadi penengah antara masyarakat dengan pengelola tambang. Hal ini karena sebagian dari perangkat desa lebih memihak pengelola tambang dan seolah-olah tidak mau tahu dengan kondisi lingkungan dan masyarakat desa. Sehingga masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk menolak maupun menentang karena tidak adanya dukungan dari Kepala desa dan perangkatnya yang memiliki kuasa dalam tataran pemerintahan di Desa Manyaran.

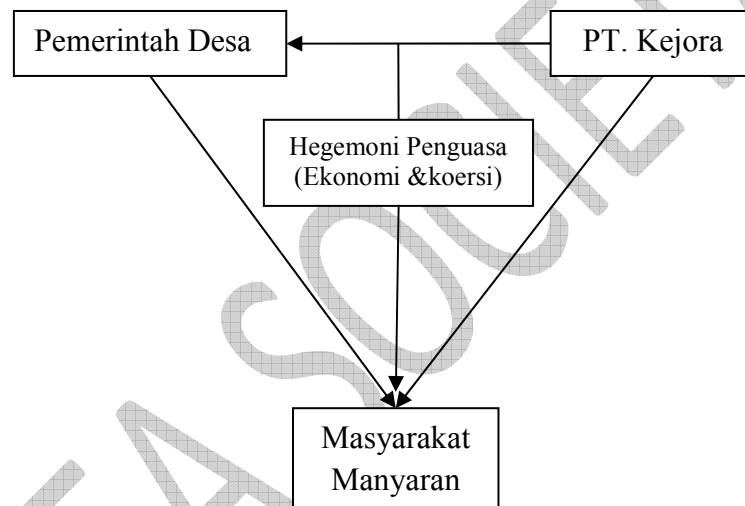
Posisi sebagai pemegang regulasi oleh pemerintah desa kala itu tidak berlangsung cukup baik. Proses perizinan untuk masuk melakukan usaha penambangan tentunya harus melalui izin dari rakyat maupun pihak desa baik Kepala Desa maupun Kepala Dusun. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Pasal 18. Selain memperoleh izin dari pihak yang berwenang, usaha penambangan galian C juga harus mendapat IPR. Hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Izin Pertambangan Rakyat yaitu izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Undang-Undang mengenai peraturan untuk melakukan usaha penambangan tidak dilakukan dalam proses perizinan dalam usaha tambang galian C di Desa Manyaran. Tanpa sepengetahuan dari masyarakat desa, pihak penambang dapat dengan mudah melakukan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut hanya dengan membayar uang sogokan kepada beberapa perangkat desa setempat.

Dalam hal ini aktivitas penambangan galian C di Desa Manyaran saat itu tanpa adanya IPR. Sebab, izin hanya sepengetahuan dari Kasun (Kepala Dusun) Manyaran yang proses masuknya secara penyuapan. Oleh karena itu, konteks perijinan usaha pertambangan galian C Desa Manyaran sebagai salah satu bukti bahwasanya hegemoni penguasa terbentuk diantara pengelola tambang, pemerintah desa, dan masyarakat Manyaran.

Apabila digambarkan dalam bagan, maka hubungan antara Pemerintah Desa, PT. Kejora dengan masyarakat Manyaran adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Hubungan Pemerintah Desa, PT. Kejora dan Masyarakat Manyaran di Tahun 2013



Sumber: Data Olahan Pribadi

Menurut Gramsci, dalam sistem sosial terdapat hubungan kelas dan kekuatan sosial yang menomorsatukan hubungan ekonomi dan berkaitan dengan kekuatan politik. Begitu pula, hubungan yang terjalin antara masyarakat Manyaran, pemerintah Desa Manyaran dan juga dengan pengelola tambang galian C terlihat jelas. Dalam keterkaitan ketiganya atas dasar hubungan kelas, baik secara kekuatan materi (ekonomi) dan kekuasaan koersi atau paksaan, dan juga konsensus. Sebagaimana hegemoni penguasa terbentuk dari pengelola tambang galian C yang memberikan uang (suap) kepada pemerintah Desa Manyaran.

Terjalannya hubungan erat antara pemerintah desa dengan pengelola tambang tersebut, tidak lain karena alasan ekonomi. Unsur materi yang berupa uang suap untuk memperoleh pembukaan usaha penambangan menjadi konsensus antara pihak Desa Manyaran dengan PT. Kejora. Bagi pengelola tambang, pemberian uang suap adalah untuk mempermudah dalam proses perizinan. Hal ini karena Kasun Manyaran adalah salah satu masyarakat politik (yang berada dalam

lembaga pemerintah) memiliki kekuatan politik atau wewenang sebagai bagian dari lembaga pemerintah desa. Maka dengan hal itu, akan mendatangkan untung karena aktivitas penggalian tambang dapat disegerakan. Sedangkan, untuk Kasun memperoleh keuntungan uang sogokan dari pengelola tambang yang memiliki kekuatan ekonomi.

Sehingga, hubungan yang terjalin adalah antara pemerintah desa dengan pengelola tambang galian C atas dasar hubungan ekonomi dan politik. Untuk masyarakat Manyaran tidak terlibat dalam keterkaitan hubungan dalam proses perizinan tambang galian C yang seharusnya melalui prosedur pemberian IPR. Tanpa sepengetahuan dari masyarakat pemerintah desa secara mudah memberikan izin pembukaan usaha pertambangan. Masyarakat Manyaran hanya sebagai pihak yang tersupremasi oleh hubungan diantara pemerintah desa dengan PT. Kejora.

Maka, jika dianalisis melalui gagasan Gramsci, masyarakat Manyaran sebagai masyarakat sipil. Menurutnya masyarakat sipil sebagai suatu arena atau tempat perjuangan dan ekspresi politik dalam kehidupan sosial antara dua kelas utama yaitu pemilik faktor produksi dengan negara. Menurut Gramsci dalam hubungan antara pemilik produksi (pemilik modal), negara dan masyarakat, aktivitas negara memainkan peran penting dalam membangun sebuah kesepakatan diantara ketiganya. Tepat, dengan kondisi yang terjadi dalam masyarakat sipil Desa Manyaran, masyarakat tersebut hanya sebagai arena perjuangan dari negara (pemerintah desa) dengan pemilik produksi tambang (PT. Kejora) yang tidak pernah dilibatkan dalam proses pembukaan usaha pertambangan galian C.

Menurut pernyataan dari Gramsci bahwa dimana ada kekuasaan maka akan muncul suatu perlawanan terhadapnya, relasi sosial yang terjalin pada masyarakat sipil menimbulkan perjuangan dan berbagai gerakan sosial. Jika hal tersebut ditilik pada kasus di Manyaran, maka perlawanan adalah untuk menutup tambang muncul dari masyarakat setempat. Pada akhir tahun 2012, muncul rencana untuk menutupnya. Gagasan tersebut muncul dari salah satu warga Manyaran yaitu Pak UD sebagai seorang pendatang yang berasal dari Kota Kediri yaitu tepatnya dari Kelurahan Kaliombo. Beliau telah menetap di Desa Manyaran selama 12 tahun.

Alasan beliau untuk menutup aktivitas penambangan adalah atas dasar masyarakat yang resah namun tidak berani mengutarakan kerisauannya. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk mengadakan musyawarah yang bertujuan untuk mengetahui apakah memang benar bahwa masyarakat Manyaran menginginkan untuk menutup tambang.

Langkah pertama yang dilakukan Pak UD untuk mengadakan musyawarah dalam rangka merencanakan gerakan sosial bersama masyarakat Manyaran adalah bentuk hegemoni progresif. Melalui upaya pemberian pandangan dalam musyawarah dan penggiringan warga untuk melakukan gerakan sosial adalah upaya elit dalam menyadarkan masyarakat sipil Manyaran untuk bersikap kritis dalam menanggapi dampak yang disebabkan oleh pemilik produksi yaitu PT. Kejora. Selain itu, melalui hegemoni progresif masyarakat Manyaran sebagai kelompok yang terpinggirkan dari pasar dan *state* dapat memperoleh kembali hak-hak akses transportasi yang layak seperti jalan dan jembatan.

Sebagaimana dalam tahapan hegemoni progresif dari Gramsci bahwa untuk mendapatkan kekuatan dalam menggerakkan suatu massa untuk melakukan aksi

kolektif terdapat tiga tahapan perkembangan dalam hegemoni progresif. Tahapan yang pertama adalah korporat-ekonomis yaitu meletakkan unsur ekonomi sebagai hal yang mendesak dan mampu mengembangkan problem sosial sehingga memunculkan suatu bentuk gerakan sosial untuk memulai perubahan. Pada isu gerakan sosial di masyarakat Manyaran terlihat bahwa inisiatif dimiliki oleh seorang tokoh masyarakat yang bernama Pak UD, dimana inisiatif tersebut muncul atas dasar dendam pribadi akibat perebutan materi (ekonomi). Artinya, untuk menggiring masyarakat dalam melakukan gerakan sosial menutup tambang galian C, kaum hegemonik didasari oleh kepentingan pribadi yang mengarah pada tujuan pencapaian materi (ekonomi).

Pada tahap korporat-ekonomis ini, seorang korporat atau kaum hegemonik yaitu sebagai individu yang mengutamakan kepentingannya sendiri dan berafiliasi dengan orang-orang untuk mendukung aksinya. Pak UD sebagai pelopor atau pihak hegemonik berafiliasi dengan beberapa orang atau masyarakat. Orang-orang tersebut dipilih sebagai perwakilan partisipasi warga dalam gerakan sosial penutupan tambang galian C.

Pada tahap kedua dalam hegemoni progresif, anggota kelompok menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang lebih luas. Artinya tokoh masyarakat yang berafiliasi dengan Pak UD sebagai perwakilan tersebut menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan untuk memperbaiki sarana prasarana umum sebagai akibat dari kerugian yang dimunculkan oleh tambang galian C. Hal ini menjadi pembentukan rasa solidaritas bersama yang didorong oleh kepentingan ekonomi yaitu tuntutan atas kerugian materi (akses umum desa) kepada PT. Kejora.

Untuk menuntut PT. Kejora tokoh-tokoh atau elit lokal tersebut melakukan upaya-upaya seperti pendirian portal untuk mendapatkan hasil dana retribusi sebagai cara untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak sebagai cara untuk memulai perubahan yang baru. Selain itu, para elit lokal secara bersama-sama membentuk panitia pengurus portal untuk mengatur dan membagi dana hasil retribusi. Sebagaimana dana hasil retribusi dari portal tersebut digunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan, penerangan jalan dan bakti sosial.

Masuk pada tahap ketiga yaitu menggiring warga Manyaran untuk turut mendukung dan melakukan gerakan sosial penutupan tambang dengan melalui beberapa pemberian penjelasan dan pandangan mengenai kerusakan lingkungan secara jangka panjang. Dalam hal ini, tahapan hegemoni progresif Gramsci atau proses mengontrol massa atau anggota gerakan sosial pada masyarakat Manyaran mulai meluas. Artinya, upaya-upaya yang dilakukan oleh elit lokal untuk menyadarkan warga Manyaran tidak hanya terkait dengan kepentingan pribadi dan penuntutan kerugian (materi). Tetapi sudah mengarah pada rencana jangka panjang yaitu mengenai pencegahan kerusakan di isu-isu lingkungan. Pada tahap ini, proses hegemoni yang dilakukan oleh Pak UD kepada masyarakat telah berjalan sempurna. Dimana dalam tahap ini masyarakat dan anggota kelompok dalam gerakan sosial menyadari kepentingan dan kebutuhan untuk menjaga lingkungan di masa saat ini dan masa yang akan datang.

E. MOBILISASI SUMBER DAYA SEBAGAI STRATEGI GERAKAN SOSIAL PENUTUPAN TAMBANG GALIAN C DESA MANYARAN

Keberhasilan gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil Desa Manyaran dalam menutup tambang galian C didorong oleh strategi-strategi yang diberikan oleh elit lokal sebagai pelopor gerakan sosial tersebut. Strategi awal yang dilakukan adalah mengadakan musyawarah. Didalam musyawarah tersebut terselip unsur sosialisasi yang diberikan oleh Pak UD mengenai pentingnya solidaritas atau kekompakan sebagai hal untuk memperkuat keberhasilan dari gerakan sosial.

Terbentuknya gerakan sosial harus memiliki satu syarat yaitu kolektif. Kolektif merupakan suatu keadaan gabungan untuk mendukung aksi yang akan dilakukan bersama-sama. Sebab, dalam aksi gerakan sosial diperlukan suatu persatuan dari kelompok untuk melakukan penolakan sebagai wujud partisipasi. Sebaliknya, jika gerakan sosial hanya sekedar dari bentuk pertentangan masyarakat Manyaran saja, dan tanpa diikuti oleh unsur kolektif dari kelompok dan partisipasi maka pertentangan, perlawanan maupun penuntutan untuk menutup tambang galian C hanya sebatas penyampaian ide dari masing-masing individu bukan aspirasi kelompok masyarakat Manyaran yang terabaikan.

Kemudian, langkah atau strategi kedua yang dilakukan oleh masyarakat adalah membuat atau mendirikan portal. Pendirian portal untuk menghimpun dana dari truk-truk yang masuk mengangkut hasil tambang galian C. Dalam setiap truk yang masuk kedalam wilayah penambangan galian C di Desa Manyaran dikenakan tarif 5000 rupiah per truk. Dana-dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan sosial didalam Desa Manyaran sendiri seperti sumbangan, penerangan jalan dan perbaikan jalan. Untuk menghimpun uang hasil portal tersebut, Pak UD sebagai elit yang menggiring gerakan sosial juga mendirikan panitia yang dinamakan semi panitia yang terdiri dari bendahara satu dan bendahara dua.

Elit lokal yang membentuk solidaritas ekonomi masyarakat Manyaran melalui pendirian portal yang memiliki tujuan menghasilkan dana untuk perbaikan jalan adalah suatu bentuk indikasi dari mobilisasi sumber daya di masyarakat Manyaran. Mobilisasi sumber daya yang terlihat dari masyarakat tersebut adalah bergeraknya kondisi masyarakat Manyaran yang pasif menjadi masyarakat yang kritis dalam menanggapi aktivitas dan dampak dari penambangan galian C. Mobilisasi sumber daya merupakan proses dari masyarakat dalam memampukan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Mobilisasi sumber daya pada masyarakat Manyaran terlihat dari munculnya aktor-aktor yang memiliki strategi yang kemudian menggerakkan masyarakat lainnya untuk memperjuangkan hak-hak yang perlu diterima.

Dalam teori mobilisasi sumber daya, capaian dari aktivis dalam menutup tambangan dipandang sebagai hasil dari proses yang dipengaruhi oleh serangkaian taktik, strategi dan keputusan yang dibuat oleh para aktor yaitu elit lokal Desa Manyaran. Taktik, strategi dan keputusan menjadi berhasil ketika semuanya memiliki beberapa sumber yang mendukung gerakan sosial. Sumber-sumber yang dimaksud meliputi sumber material yang berupa pekerjaan, penghasilan dan

tabungan. Sedangkan sumber non-material berupa kepemimpinan, wewenang, komitmen, persahabatan, kepercayaan dan kemampuan.

Keberhasilan gerakan sosial penutupan tambang galian C di Manyaran juga tidak lepas dari sumber-sumber yang disebutkan diatas. Untuk dapat menutup pertambangan dibutuhkan seseorang yang mampu mengorganisir anggota gerakan sosial. Artinya, dalam gerakan sosial penutupan tambang galian C desa Manyaran terdapat pemimpin yaitu Pak UD sebagai pelopor dan pencetus inisiatif gerakan serta sebagai elit lokal yang memberikan taktik dan strategi penuntutan dan penutupan tambang melalui pendirian portal.

Seseorang yang menjadi tokoh masyarakat merupakan orang yang dipercaya dan memiliki kemampuan untuk mengondisikan atau menggerakkan warga setempat dilingkungan sekitarnya. Masyarakat Manyaran memandang, seorang tokoh masyarakat tidak harus seorang yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang tinggi. Namun, tokoh masyarakat merupakan seseorang yang mampu menjadi pemimpin dari masyarakat disekitarnya. Pemimpin yang dimaksud adalah orang yang mampu menggerakkan masyarakat lainnya untuk tujuan yang benar seperti upaya pencegahan dampak negatif kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan galian C.

Dalam sebuah kepemimpinan memiliki beberapa jenis atau gaya, salah satunya adalah kepemimpinan karismatik dan profesional. Seorang tokoh atau pemimpin karismatik memiliki kekuatan kepercayaan dari masyarakat atau lingkungan sekitar. Pada konteks ini tidak ada latar belakang yang mendasari masyarakat mempercayai seorang pemimpin, hanya saja pemimpin tersebut memiliki kekuasaan tradisional yang diperolehnya atas pengabdian diri dan sifat kepahlawanan atau yang patut dicontoh dari ketertiban atas kekuasaannya.

Kepemimpinan yang terdapat pada isu gerakan sosial di Desa Manyaran, dimana Pak UD sebagai pemimpin dari aksi penutupan tambang galian C adalah gaya kepemimpinan karismatik. Hal ini karena, Pak UD dalam lingkungan di Desa Manyaran, beliau mendapatkan kepercayaan yang kuat. Disisi lain beliau juga menjadi panutan atau contoh dari warga disekitarnya karena beberapa kegiatan sosial yang dia lakukan untuk membantu sesama masyarakat Desa Manyaran. Beberapa tindakan sosialnya dalam membantu warga yang sedang sakit seperti mengantarkan ke Rumah Sakit menjadi kekuatan yang melekat pada diri Pak UD bahwa beliau adalah sosok yang baik dan patut untuk dijadikan seorang pemimpin dalam kegiatan untuk mencapai tujuan bersama menuju perubahan sosial di lingkungan Desa Manyaran.

Faktor atau unsur kemampuannya dalam mendorong warga Manyaran untuk melakukan gerakan sosial penutupan tambang juga menjadi nilai plus untuk menjadikannya sebagai pemimpin profesional. Pemimpin atau gaya kepemimpinan profesional adalah pemimpin yang meletakkan kemampuan dan kualitasnya dalam menaungi anggota-anggota dibawahnya. Meskipun, Pak UD yang sebagai pemimpin gerakan sosial tersebut bukan seorang akademisi dan hanya memiliki ijazah SMA tetapi beliau memiliki kemampuan atau kepiawaian dalam menggerakkan dan mendorong masyarakat Manyaran menutup tambang. Kemampuannya tersebut terlihat dari cara-caranya dalam memobilisasi warga Manyaran.

Adanya kedua gaya kepemimpinan tersebut memperlihatkan bahwa gerakan sosial di Desa Manyaran merupakan gerakan sosial neo-klasik. Pada dasarnya gerakan sosial neo-klasik merupakan pergeseran gerakan sosial lama ke gerakan sosial baru. Pada konteks gerakan sosial lama dicirikan dengan gerakan yang meneriakkan anti kapitalisme, revolusi dan perjuangan kelas, selain itu dalam gerakan sosial lama menempatkan pemimpin gerakannya atas unsur kekuasaan tradisional atau karismatik. Sedangkan gerakan sosial baru, tidak berkutat pada isu ekonomi atau anti kapitalisme tetapi sudah merambah pada bidang-bidang diluar ekonomi seperti isu-isu humanis dan lingkungan. Dalam gerakan sosial baru juga melihat pemimpin gerakan atas dasar unsur tingkat pendidikan, kemampuan dan kapasitas dari aktor.

Sehingga, pada posisi ini gerakan sosial yang terdapat di Desa Manyaran merupakan peralihan atau pergeseran dari gerakan sosial lama menuju gerakan sosial baru. Artinya gerakan penutupan tambang galian C adalah gerakan sosial Neo-klasik. Dimana Pak UD sebagai pemimpin gerakan sosial memiliki label pemimpin karismatik dan juga profesional. Hal ini karena ia mendapatkan kepercayaan dari warga Manyaran atas dasar sifat pribadinya dan juga karena pengalaman serta kemampuan dalam mengusung masyarakat Manyaran melalui strategi mobilisasi agar menyadari isu kerusakan lingkungan Desa Manyaran guna melakukan penuntutan dan penutupan tambang galian C.

Elit lokal desa sebagai intelektual atau pemimpin melewati tahap hegemoni progresif dari Gramsci melakukan beberapa upaya dan strategi untuk mencapai tujuannya. Strategi *pertama* yaitu melakukan sosialisasi bersama masyarakat melalui musyawarah mengenai dampak negatif dari adanya usaha tambang galian C. *Kedua*, mereka memiliki inisiatif mendirikan portal sebagai cara untuk menggalang dana retribusi guna memperbaiki akses sarana dan prasarana umum seperti jalan dan jembatan di Desa Manyaran. *Ketiga*, membuat sistem pembagian hasil dari dana retribusi portal, dimana dana 50% untuk perbaikan jalan dan jembatan, 25% untuk penerangan jalan dan 25% untuk kegiatan bakti sosial. *Keempat*, mengelola sumber daya – sumber daya seperti jaringan sosial yang terbangun diantara warga manyaran untuk menguatkan solidaritas dalam melakukan gerakan sosial. *Kelima*, memberikan sosialisasi mengenai perlunya komitmen dalam pelaksanaan aksi penutupan tambang galian C, hal ini sebagai caranya untuk mengorganisir warga Manyaran menuju tercapainya tujuan menuntut dan menutup tambang galian C.

Jadi dalam upaya menuju pencapaian gerakan sosial menutup tambang, elit lokal sebagai pemimpin gerakan memobilisasi sumber daya manusia (*human asset*) masyarakat Desa Manyaran melalui penguatan jaringan sosial, komitmen warga dengan mengadakan sosialisasi dalam musyawarah bersama. Serta, mendirikan portal untuk menggalang dana dan membagi hasil retribusinya sebagai perbaikan sarana umum adalah wujud mobilisasi sumber daya *tangible* yang meliputi unsur finansial dan fasilitas dalam mendukung keberhasilan gerakan sosial menutup tambang galian C di Desa Manyaran.

Jika ditelaah melalui model pendekatan mobilisasi sumber daya sebagai strategi atau taktik gerakan sosial, gerakan yang terdapat pada Desa Manyaran termasuk dalam *The Political Interaktif Model* dan *The Organizational*

Entrepreneurial Modal. Pada model *The Organizational Entrepreneurial Modal* ini terbaca dari keberhasilan suatu gerakan sosial penutupan tambang galian C yang menekankan pentingnya suatu pengorganisasian sumber daya. Adanya faktor seperti jaringan dan komitmen dari masyarakat setempat menjadi pengaruh yang secara signifikan menentukan keberhasilan gerakan sosial masyarakat.

Disisi lain, hal yang menjadi temuan dari penelitian ini adalah bahwa gerakan sosial di Desa Manyaran tersebut juga masuk dalam kategori analisis pendekatan *The Political Interaktive Model*. Karena keberhasilan gerakan penutupan tambang juga ditopang perubahan struktur desa. Dimana, pada saat gerakan sosial berlangsung, bertepatan dengan perubahan kepemimpinan atau terjadi masa transisi perubahan kepala desa. Munculnya pemimpin baru desa yang mendukung aksi warga setempat yaitu Kepala Desa Manyaran yang terpilih di tahun 2013 yang lalu. Sebagaimana pendekatan *The Political Interaktive Model* yang menjelaskan bahwa relasi negara dan bingkai sistem politik adalah determinan penting bagi keberhasilan suatu gerakan sosial. Oleh karena, dalam isu gerakan sosial di Manyaran telah menunjukkan bahwa perubahan struktur kepemimpinan desa membawa perubahan relasi antara masyarakat dengan negara yang pada akhirnya membawa kesuksesan gerakan penutupan tambang.

Hal diatas terlihat dari data dan informasi yang menunjukkan bahwa, meskipun kesadaran masyarakat Manyaran dan elit-elit lokal telah ada sejak tambang berdiri, namun gerakan sosial penutupan tambang galian C baru muncul ketika masa pemerintahan Kepala Desa baru. Kepala Desa yang diusung oleh warga Manyaran dengan perolehan suara 4012 dari total suara 4700 jiwa, menjadi Kepala Desa yang pro-warga. Berbeda pada pemerintahan sebelumnya yang tidak memihak sama sekali terhadap warga. Oleh karena itu, ketika ada pergantian kepemimpinan pemerintahan, masyarakat desa merasa memiliki sosok pemimpin yang membela warga. Sehingga masyarakat memiliki antusias untuk melakukan sebuah gerakan sosial

Munculnya sosok pemimpin atau Kepala Desa baru di Desa Manyaran, nyatanya juga membawa perubahan kondisi masyarakat yang pasif menjadi kritis untuk melakukan suatu gerakan sosial penutupan tambang. Pemimpin yang diusung oleh warga nyatanya juga merubah sikap masyarakat dalam menilai aktivitas penambangan. Hal tersebut, didorong oleh sosok pemimpin atau Kepala Desa yang mendukung warga. Artinya, dalam posisinya sebagai bagian dari negara atau *state* Kepala Desa menjalankan wewenangnyanya dalam meregulasi atau mengatur hubungan penambang dengan masyarakat sipil.

F. KESIMPULAN

Gerakan sosial masyarakat sipil menutup tambang galian C di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri terbangun dari dampak kerusakan lingkungan masyarakat Manyaran baik secara fisik dan sosial. Ide atau inisiatif gerakan sosial dimiliki oleh elit lokal yang berangkat dari adanya hegemoni penguasa dari PT. Kejora dan pemerintahan Desa Manyaran di tahun 2005 hingga 2012. Hegemoni penguasa yang terbentuk adalah hubungan kekuasaan antara pengelola tambang atas masyarakat karena kekuatan finansial

(ekonomi), unsur paksaan atau koersi serta adanya konsensus antara pemerintah desa dengan PT. Kejora dalam proses perizinan pembukaan tambang galian C.

Hegemoni penguasa yang berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun di masyarakat Manyaran, berkembang menjadi hegemoni progresif di tahun 2013. Hegemoni progresif adalah upaya yang dilakukan oleh elit lokal untuk mendorong dan menggiring warga melakukan gerakan sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni penguasa. Dalam hegemoni progresif, elit lokal melalui tiga tahapan yaitu *pertama* korporat-ekonomis dimana unsur ekonomi menjadi faktor yang mendesak elit lokal untuk berafiliasi dan mendorong masyarakat melakukan gerakan sosial penutupan tambang galian C. *Kedua*, elit lokal atau pemimpin gerakan sosial menyadarkan masyarakat atas dasar solidaritas ekonomi yaitu penuntutan ganti rugi kerusakan sarana umum sebagai tujuan bersama yang akan dicapai. *Ketiga*, elit lokal menyadarkan masyarakat bukan sekedar solidaritas ekonomi tetapi atas dasar kepentingan yang lebih luas dalam jangka panjang yaitu mengarah pada konservasi lingkungan desa untuk mencegah bencana banjir di masa yang akan datang.

Dalam proses melakukan hegemoni progresif yang ditujukan untuk mendorong masyarakat sipil melakukan gerakan sosial penutupan tambang galian C, elit lokal menerapkan beberapa strategi. Strateginya adalah dengan memobilisasi sumber daya manusia (*human asset*) dan sumber daya *tangible*. Strategi memobilisasi sumber daya manusia (*human asset*) adalah dengan melalui penguatan jaringan sosial dan komitmen warga melalui sosialisasi dalam musyawarah bersama. Sedangkan strategi memobilisasi sumber daya *tangible* yang meliputi fasilitas dan finansial adalah dengan mendirikan portal untuk menggalang dana dan membagi hasil retribusi portal sebagai perbaikan sarana umum seperti jalan dan jembatan, serta untuk kegiatan sosial warga Manyaran.

Daftar Pustaka

- Fakih, M. (2002). *Wacana menuju gerakan sosial baru*. Yogyakarta: Insist Press
- Salim, A. (2001). *Teori dan paradigma: Penelitian sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Simon, R. (2001). *Gagasan-gagasan politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tribowo, D. (2006). *Gerakan sosial: Wahana civil society bagi demokratisasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Kementerian Energi Sumberdaya Mineral. Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang izin pertambangan rakyat. Jakarta: Penyusun
- Kementerian Lingkungan Hidup. Undang-undang nomor 23 pasal 18 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jakarta: Penyusun

Yin, R.K. (2013). *Studi kasus desain dan metode*. Jakarta: Rajawali Pers

Yusron. (2009). *Elite lokal dan civil society : Kediri di tengah demokratisasi*.
Jakarta: LP3ES

IDEA SOCIETY